

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Keniscayaan Politik Identitas Dari Suatu Bangsa dan Agama

Zahrotunnimah

Dosen Universitas Ibn Khaldun Bogor



[10.15408/adalah.v4i2.15529](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.15529)

Abstract:

*The discussion of this simple article was inspired by a book entitled *The Politics of Identity and the Future of Our Pluralism*. The problem in this book is whether the identity politics in Indonesia will jeopardize the nationalist position and pluralism in Indonesia in the future? If dangerous in what form? How to handle it? The source of this book relies on the opinion of L. A. Kauffman who first explained the nature of identity politics, and who first introduced the term political identity which is still unknown. However, in this book explained substantively, identity politics is associated with the interests of members of a social group who feel blackmailed and feel alienated by large currents in a nation or state.*

Keywords: Identity Politics, Nation, Religion

Abstrak:

*Pembahasan artikel sederhana ini terinspirasi dari buku berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Permasalahan dalam buku ini adalah apakah politik identitas di Indonesia ini akan membahayakan posisi nasionalis dan pluralisme di Indonesia di masa yang akan datang? Jika berbahaya dalam bentuk apa? Bagaimana cara mengatasinya? Sumber buku ini bersandarkan pada pendapat L. A. Kauffman yang pertama kali menjelaskan tentang hakekat politik identitas, dan siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah politik identitas yang masih belum diketahui sampai saat ini. Tetapi, didalam buku ini dijelaskan secara substansif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan merasa tersingkir oleh arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.*

Kata Kunci: Politik Identitas, Bangsa, Agama

Prolog

Hakekat Politik Identitas pertama kali dijabarkan L. A Kauffman dalam bukunya. Ia pun mempertanyakan siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah politik identitas. Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi Ahmad Syafi'i Ma'arif untuk menuliskan buku berjudul Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Didalam buku tersebut dijelaskan secara substansif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial, yang merasa diperas dan merasa tersingkir oleh arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.

Statemen Terkait Politik Identitas

Ada beberapa statemen yang muncul terkait dengan politik identitas diantaranya adalah:

Pernyataan Syafii Maarif tentang politik identitas yang lebih terkait pada etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili para elit politik. Menurutnya, isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi isu politik sentral, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin. Implikasi negatifnya dampak menimbulkan upaya disintegrasi bangsa dan gerakan separatisme. (Maarif, 2012:3).

Musdah Mulia mengatakan bahwa politik identitas di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak ada suatu masyarakat yang benar-benar tunggal, uniter (*unitary*), dan tanpa ada unsur-unsur perbedaan didalamnya. Menurutnya, politik identitas dilakukan oleh kelompok mainstream, yaitu kelompok agama mayoritas yang dianggap memiliki niat untuk menyingkirkan kaum minoritas yang dianggap menyinggung atau menyeleweng (Mulia, 2012 hal. 45).

Heirij melihat politik identitas di Indonesia melalui studi gerakan sosial dan menyimpulkan bahwa terminologi politik identitas adalah gerakan yang berusaha membela dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas karena identitas yang dimilikinya (Heirij, 2012 : 53).

Sujatmiko menunjukkan bahwa politik Identitas di Indonesia yang bertendensi ideologis (Islamisme, Sosialisme, dan Marhaenisme) dalam tradisi politik, sudah hilang bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan orde Lama (ketika Soekarno berkuasa), akan tetapi baru muncul kembali setelah runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru 32 tahun kemudian, yang dibawa oleh arus besar demokratisasi di Indonesia (Sujatmiko, 2012: 75).

Asfinawati menjelaskan bahwa politik identitas dalam perspektif Hak-hak asasi manusia, bahwa pasal satu konvensi Hak sipil dan politik menjamin hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri, karena itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pengembangan ekonomi, sosial dan budaya (Asfinawati, 2012: 61).

Komponen Operasionalisasi Politik Identitas

Dari beberapa pernyataan pendapat para ahli terkait identitas politik di Indonesia diatas, penulis menyimpulkan terdapat tiga komponen terkait operasionalisasi politik identitas di Indonesia, yaitu: Pertama, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Kedua, dimana wilayah agama sebagai lahan beroperasinya politik identitas. Ketiga, politik identitas pada ranah wilayah hukum. Dalam Wilayah ini ibarat pisau bermata dua. Karena yang dimaksud dengan wilayah hukum disini adalah wilayah paduan antara wilayah negara dan agama, karena masing-masing memiliki aturannya sendiri.

Politik Identitas merupakan pemanfaatan manusia secara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu. Politik Identitas di Indonesia merupakan pemanfaatan manusia secara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok, karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu. Mengutip tesis Murad Hoffman bahwa sikap anti pluralisme bukanlah cara berislam yang sehat, bahkan merupakan suatu kemunduran.

Oleh karena itu, politik identitas, sering digunakan di masa

lampau. Sebagai Contoh Adolf Hitler yang meyakinkan orang-orang Jerman bahwa sumber krisis ekonomi dan kekalahan perang dunia adalah karena pengaruh orang-orang Yahudi. Dengan janji-janji manis untuk membesarkan Jerman pada saat itu, Hitler bersama partainya berhasil memenangkan pemilu di tahun 1932. Solusi yang ia tawarkan adalah melenyapkan orang Yahudi dan janji itulah yang dijual dan dibeli sebagian besar Rakyat Jerman. Sehingga mengakibatkan tragedi yang terjadi di Jerman pada saat Nazi berkuasa. Enam juta orang Yahudi menjadi korban kekejaman politik identitas dan itu menjadi salah satu peristiwa genosida terburuk yang tercatat dalam sejarah dunia.

Epilog

Kesimpulan yang dapat dipetik dalam pembahasan diatas, bahwa Politik identitas merupakan keniscayaan dari suatu bangsa dan agama mayoritas terhadap kelompok minoritas lainnya.

Referensi

- Abdillah, Ubed. Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: IndonesiaTera, 2002.
- Aji, A.M; Yunus, N.R. "Identity Politics in Cultural and Structural Islam in Indonesia," Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 19. No. 1 (2019).
- Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press.1983.
- Setyaningrum, Arie. "Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politikposkolonial." dalam "Politik perlawanan" Yogyakarta: IRE, 2005.
- Ernest Gellner, Nations and nationalism, Ithaca : Cornell University Press, 1983.
- Maarif, Ahmad Syafii, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, (Jakarta: Democracy Project, 2012).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.